

PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SDM PETERNAK MELALUI PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET) DI DESA SUMBER REJEKI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN

Noor Halimah Jano¹, Saidah Hasbiah², M.Ridha Anshari³
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: noorhalimah23jan@gmail.com

ABSTRAK

Program Kesehatan Masyarakat Veteriner (**Kesmavet**) merupakan pilar strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesehatan nasional melalui pengawasan ternak yang ketat. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengendalian penyakit, tetapi juga berupaya mentransformasi kapasitas peternak agar lebih profesional. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap 13 informan yang dipilih secara *purposive sampling*, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana program tersebut mencapai tujuannya. Hasil kajian menunjukkan adanya dinamika pada tingkat **efektivitas** pelaksanaan. Dari sisi regulasi, program ini dinilai kredibel karena kepatuhan terhadap SOP dan sinkronisasi administrasi yang baik. Namun, secara operasional, ditemukan kendala signifikan berupa sebaran pembinaan yang belum merata serta keterbatasan inovasi akibat minimnya fasilitas laboratorium dan tenaga medis. Rendahnya partisipasi peternak dan ketiadaan praktik lapangan langsung menyebabkan transfer pengetahuan menjadi kurang optimal. Selain itu, ketergantungan pada anggaran pemerintah pusat masih menjadi hambatan dalam kemandirian program di daerah. Untuk memperbaiki **peranan** instansi terkait, diperlukan strategi jemput bola melalui penyuluhan langsung di kandang dan penguatan monitoring penyakit musiman. Melibatkan peternak sukses sebagai figur percontohan (*role model*) sangat disarankan untuk mengubah kebiasaan konvensional yang sulit diubah. Pendekatan persuasif ini diharapkan mampu meningkatkan **partisipasi** komunitas peternak sehingga standar kesehatan hewan dan keamanan pangan dapat tercapai secara menyeluruh.

Kata Kunci: Efektivitas, Peranan, Partisipasi

ABSTRACT

*The Veterinary Public Health (**Kesmavet**) program is a strategic pillar designed to ensure animal health, public safety, and the security of animal-derived food products. Beyond technical disease control, this initiative aims to modernize farmers' skills and professional attitudes. Utilizing a qualitative-descriptive approach with 13 purposively selected respondents, this study evaluates the program's overall impact and operational challenges.*

*The findings reveal that the **effectiveness** of the program is currently a mix of regulatory success and field-level obstacles. While the program maintains high credibility through strict adherence to Standard Operating Procedures (SOPs) and administrative alignment, its execution remains uneven. Key barriers include limited laboratory facilities, a shortage of medical personnel, and a lack of direct field practice. Furthermore, the **role** of local authorities is still heavily dependent on central government support, which hinders regional innovation and program independence.*

*To enhance grassroots **participation**, the Department of Animal Husbandry must adopt a more proactive approach, such as conducting direct on-site counseling and improving seasonal disease monitoring. Addressing deep-rooted traditional habits requires a persuasive social strategy, including the involvement of successful farmers as role models. By providing practical educational materials and fostering community engagement, the government can better ensure that animal health standards are met across all sectors.*

Keywords: *Effectiveness, Role, Participation.*

PENDAHULUAN

Sektor peternakan di Indonesia memegang peranan yang sangat fundamental dalam menopang ketahanan pangan nasional dan stabilitas ekonomi masyarakat. Sebagai kontributor lebih dari 12% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian nasional menurut data Kementerian Pertanian tahun 2022, subsektor ini tidak hanya berfungsi sebagai pemasok utama protein hewani, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi di wilayah perdesaan. Namun, potensi ekonomi yang begitu besar ini sering kali terhambat oleh masalah klasik yang sulit diurai, yakni rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat peternak. Sebagian besar peternak masih mengandalkan sistem budidaya tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, tanpa dukungan literasi teknologi maupun manajemen usaha yang modern.

Kesenjangan antara potensi pasar dan kapasitas peternak menciptakan tantangan serius dalam aspek kesehatan hewan dan keamanan pangan. Peternak saat ini dituntut untuk memiliki kompetensi yang komprehensif, mulai dari keterampilan teknis pemeliharaan hingga pemahaman mendalam mengenai standar biosekuriti. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi terbaru mengakibatkan praktik peternakan sering kali mengabaikan prinsip-prinsip sanitasi dan higiene. Tanpa adanya transformasi pola pikir dari peternak tradisional menjadi peternak profesional, sektor ini akan sulit menjawab tantangan global terkait standar produk yang aman untuk dikonsumsi.

Dalam menjawab tantangan tersebut, program Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) muncul sebagai instrumen strategis yang menjembatani kepentingan kesehatan hewan dan kesehatan publik. Urgensi program ini semakin nyata mengingat data FAO (2021) menyebutkan bahwa sekitar 70% penyakit infeksi baru pada manusia bersifat zoonosis atau bersumber dari hewan. Di Kabupaten Balangan, khususnya melalui peran DKP3, program Kesmavet diarahkan untuk menjadi benteng pertahanan pertama dalam mengendalikan penyebaran penyakit sekaligus memastikan kualitas pangan asal hewan tetap terjaga. Implementasi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) menjadi bukti nyata adaptasi pemerintah daerah terhadap preferensi konsumen modern yang kini lebih kritis terhadap aspek kesehatan dan reliabilitas produk pangan.

Secara operasional, DKP3 Kabupaten Balangan menjalankan peran multifungsi sebagai inovator, stabilisator, dan pelaksana teknis melalui berbagai inisiatif di tahun 2024. Program-program seperti KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), pemberian asuransi usaha ternak (AUTS/K), hingga layanan Inseminasi Buatan (IB) dirancang secara terpadu untuk menjangkau para peternak dan penyuluh. Tidak hanya berhenti pada aspek produksi, pemerintah juga melakukan upaya promotif melalui kampanye gemar makan daging, telur, dan susu bagi anak-anak di seluruh kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan peternakan di wilayah Balangan dikelola secara holistik, mulai dari hulu di kandang peternak hingga ke hilir pada konsumsi masyarakat.

Meskipun peta jalan program telah disusun dengan sangat detail, realisasi di lapangan tetap menghadapi berbagai dinamika dan hambatan. Kendala utama sering kali muncul dari faktor budaya dan keterbatasan sarana prasarana yang menghambat pemerataan pembinaan. Banyak peternak yang masih enggan meninggalkan kebiasaan lama karena terbatasnya tenaga penyuluh yang dapat memberikan pendampingan secara intensif. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang program Kesmavet sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam melakukan pendekatan sosial yang persuasif dan berkelanjutan. Dengan penguatan sinergi antara regulasi yang kuat dan partisipasi peternak yang aktif, sektor peternakan diharapkan dapat bertransformasi menjadi industri yang lebih produktif, kompetitif, dan mampu menjamin keamanan pangan nasional secara menyeluruh.

Fenomena masalah yang saya observasi dalam program kesmavet, khususnya di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Juai, adalah :

1. Kelemahan dalam Fungsi Stabilisator dan Pembinaan Berkelanjutan : Dinas terkait dinilai belum optimal dalam menjaga ritme dan keberlanjutan pembangunan peternakan melalui kebijakan yang konsisten. Hingga saat ini, intervensi pembinaan kepada peternak masih bersifat insidental (sporadis) dan belum terdistribusi secara adil. Kondisi ini memicu ketimpangan pengetahuan, di mana hanya segelintir kelompok yang mendapatkan edukasi kesehatan ternak, sementara mayoritas lainnya belum terjamah. Masalah fundamentalnya terletak pada keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun rasio tenaga penyuluh yang sangat jomplang dibandingkan dengan luas wilayah serta populasi peternak di lapangan.
2. Minimnya Inovasi dan Terobosan Manajerial : Peran sebagai inovator dalam manajemen kesehatan hewan dan pengembangan kapasitas SDM masih sangat terbatas. Belum ada transformasi signifikan menuju metode pelatihan modern maupun pemanfaatan teknologi digital (E-Livestock) dalam sistem informasi kesehatan. Akibatnya, peternak terus terjebak dalam praktik tradisional yang berdampak pada stagnasi produktivitas. Hal ini dipicu oleh dominasi anggaran operasional yang menguras alokasi untuk riset dan inovasi. Selain itu, rendahnya tingkat literasi teknologi di kalangan peternak membuat dinas cenderung mengambil jalan aman dengan mempertahankan metode konvensional, yang justru menghambat akselerasi modernisasi.
3. Kendala Infrastruktur sebagai Penggerak Modernisasi : Dinas belum mampu menjadi motor penggerak modernisasi peternakan yang berbasis efisiensi dan teknologi. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas vital seperti laboratorium kesehatan hewan, alat uji medis, dan ketersediaan tenaga medis veteriner masih jauh dari kata memadai. Kapasitas sarana prasarana yang minim ini mengakibatkan deteksi dini terhadap penyakit menular menjadi sulit dilakukan secara cepat dan akurat, sehingga standar kesehatan modern sulit diterapkan hingga ke tingkat desa.
4. Keterbatasan Peran sebagai Figur Percontohan (*Role Model*) : Dinas belum sepenuhnya berhasil menjadi representasi utama dalam penerapan prinsip Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet). Lemahnya intensitas sosialisasi dan minimnya demonstrasi praktik langsung di lapangan mengakibatkan antusiasme masyarakat tetap rendah. Kendala utama masih berakar pada defisit SDM teknis dan keterbatasan dana. Dengan wilayah binaan yang luas namun jumlah petugas yang sedikit, kegiatan edukasi tidak dapat dilaksanakan secara rutin, sehingga program pemerintah sering kali dianggap asing oleh komunitas peternak lokal.
5. Tingginya Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat : Kemandirian daerah dalam menyelenggarakan pelayanan veteriner masih menjadi isu krusial. Saat ini, pelaksanaan program Kesmavet sangat bergantung pada arahan serta kucuran dana dari pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini menyebabkan daerah kehilangan fleksibilitas untuk mengembangkan program yang sesuai dengan kearifan lokal. Kapasitas fiskal daerah yang lemah membuat anggaran sering kali tidak mencukupi untuk pengadaan obat-obatan, alat medis, dan biaya operasional lapangan yang tinggi, sehingga ketergantungan pada dana transfer menjadi pilihan yang tidak terelakkan.

Keberhasilan pembangunan nasional di berbagai lini, termasuk ranah agrikultur dan peternakan, sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelolanya. Merujuk pada pemikiran Dessler (2020), SDM bukan sekadar tenaga kerja, melainkan aset fundamental organisasi yang memanifestasikan pengetahuan, keahlian, dan kapabilitas individu untuk merealisasikan visi strategis. Dalam ekosistem peternakan, SDM peternak mencakup entitas individu maupun kolektif yang terlibat secara langsung dalam rantai nilai produksi—mulai dari proses pemeliharaan, manajemen teknis, hingga penetrasi pasar hasil ternak. Kapasitas SDM ini tecermin dari integrasi kognitif, keterampilan motorik, dan afektif dalam mengelola usaha agar mampu menghasilkan output yang optimal, baik secara kuantitas biologis maupun nilai ekonomi. Sejalan dengan pendapat Soetriono & Ani (2020), kualitas SDM peternak menjadi variabel determinan karena mereka adalah aktor utama dalam mengakomodasi inovasi teknologi

serta mengimplementasikan manajemen profesional di tingkat akar rumput.

Secara sosiologis, keberhasilan sebuah kebijakan tidak dapat dilepaskan dari konsep peran. Peran merupakan elemen sentral yang menjadi penggerak utama dalam setiap fenomena kemasyarakatan, yang operasionalisasinya berpijak pada norma dan regulasi tertentu. Soerjono Soekanto (2014) mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis dari sebuah kedudukan atau status. Ketika seseorang mengaktualisasikan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosial yang disandangnya, maka ia tengah menjalankan sebuah peranan. Keberagaman peran yang dimiliki individu berasal dari pola-pola kehidupan sosiokulturalnya, yang pada akhirnya menentukan kontribusi individu tersebut bagi komunitasnya. Pentingnya sebuah peran terletak pada fungsinya sebagai pengatur perilaku yang memungkinkan adanya prediksi sosial terhadap tindakan orang lain, sehingga tercipta harmoni dan penyesuaian diri dalam kelompok.

Dalam struktur organisasi pemerintahan, peran mencakup tiga dimensi fundamental sebagaimana diuraikan oleh Levinson dalam karya Soekanto: dimensi norma yang terikat pada posisi sosial, dimensi konseptual mengenai kontribusi individu dalam organisasi, dan dimensi perilaku yang krusial bagi stabilitas struktur sosial. Khusus bagi pemerintah, perannya sangat krusial dalam menyukseskan otonomi daerah dan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah bukan sekadar regulator, melainkan aktor dominan dengan otoritas kekuasaan untuk mengarahkan arah kemajuan. Siagian (2018) merumuskan lima fungsi utama pemerintah dalam konteks ini: (1) sebagai Stabilisator yang menjaga keseimbangan sistem, (2) sebagai Inovator yang memicu lahirnya kebaruan, (3) sebagai Modernisator yang menggiring masyarakat menuju peradaban maju, (4) sebagai Pelopor atau role model, dan (5) sebagai Pelaksana Mandiri dalam kegiatan pelayanan publik yang tidak mampu dipenuhi sektor swasta.

Salah satu manifestasi nyata dari peran pemerintah di sektor peternakan adalah Program Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet). Program ini merupakan pilar strategis pembangunan peternakan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Kesmavet memiliki mandat untuk memitigasi risiko kesehatan masyarakat melalui pengendalian zoonosis—penyakit yang menular dari hewan ke manusia—serta menjamin keamanan pangan asal hewan. Pelaksanaan program ini di tingkat lokal berada di bawah otoritas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Balangan, sebagai wujud sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Mengingat populasi ternak seperti sapi, unggas, dan kambing yang signifikan di Balangan, tantangan dalam menjaga prinsip ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) menjadi sangat relevan guna mencegah wabah mematikan seperti antraks atau rabies.

Operasionalisasi Kesmavet di Balangan mencakup pengawasan ketat di Rumah Potong Hewan (RPH), pengawasan keamanan pangan di pasar, serta peningkatan kapasitas peternak melalui penyuluhan. Ditjen PKH (2020) menekankan bahwa program ini harus dijalankan dengan prinsip One Health, yakni kolaborasi lintas sektoral antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Melalui edukasi mengenai biosekuriti, sanitasi kandang, dan pengelolaan limbah, pemerintah berupaya mentransformasi perilaku peternak agar lebih higienis dan adaptif. Hal ini diperkuat oleh landasan hukum yang rigid, mulai dari UU No. 18 Tahun 2009 hingga peraturan menteri teknis yang mengatur standar operasional kesehatan masyarakat veteriner.

Selain aspek teknis medis, upaya peningkatan kualitas SDM peternak juga dilakukan melalui pendekatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Pendekatan ini bertujuan mendiseminasi informasi yang akurat dan mudah dicerna sehingga peternak mampu mengadopsi teknologi modern dalam manajemen reproduksi dan pemasaran. Instrumen proteksi seperti Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) juga disediakan untuk melindungi peternak dari kerugian ekonomi akibat kematian ternak. Di sisi lain, teknologi Inseminasi Buatan (IB) diterapkan guna akselerasi peningkatan mutu genetik ternak. Di tingkat hilir, pemerintah mengencarkan Gerakan Gemar Makan Daging, Susu, dan Telur sebagai strategi menurunkan angka stunting melalui pemenuhan protein hewani bagi anak-anak.

Namun, efektivitas peran DKP3 dalam menjalankan Program Kesmavet di Kabupaten Balangan, khususnya di Desa Sumber Rejeki, masih menghadapi tantangan empiris yang

tecermin dalam kerangka pemikiran kritis. Sebagai stabilisator, dinas sering kali terkendala pembinaan yang tidak merata karena keterbatasan jangkauan petugas. Sebagai inovator dan modernisator, keterbatasan infrastruktur laboratorium dan rendahnya literasi digital peternak menghambat akselerasi teknologi peternakan. Peran sebagai pelopor juga sering terhambat oleh minimnya demonstrasi lapangan yang rutin, sementara peran sebagai pelaksana mandiri masih sangat bergantung pada kucuran anggaran dari pemerintah pusat.

Secara komprehensif, keberhasilan transformasi peternakan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kompetensi SDM aparatur dan ketersediaan sarana prasarana teknis, sementara faktor eksternal melibatkan ketersediaan pendanaan daerah, sinkronisasi kebijakan, serta tingkat partisipasi dan kesadaran sosial-ekonomi peternak. Tanpa integrasi yang kuat antara landasan hukum, peran aktif birokrasi, dan kesiapan mental peternak, program Kesmavet tidak akan mampu mencapai tujuannya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berdaya saing secara berkelanjutan.

METODE

Pelaksanaan penelitian ini mengambil lokus utama di Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Balangan yang terletak di Kecamatan Paringin Selatan. Pemilihan lokasi ini bersifat strategis karena DKPPP merupakan pusat gravitasi kebijakan dan implementasi teknis di sektor peternakan daerah. Selain di pusat administrasi, penelitian ini memperluas cakupannya hingga ke Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Jui. Pemilihan desa ini dilakukan dengan metode **sampling bertujuan (*purposive sampling*)**. Dasar pertimbangannya adalah eksistensi Desa Sumber Rejeki sebagai salah satu sentra peternakan sapi dan unggas yang paling aktif, serta statusnya sebagai wilayah binaan intensif dalam program Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet). Secara geografis, desa yang berjarak sekitar 45 kilometer dari pusat kota Paringin ini memiliki potensi agraris yang besar namun peternaknya masih memerlukan intervensi edukatif untuk meningkatkan literasi kesehatan hewan dan standar keamanan pangan hewani.

Secara paradigmatik, penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagaimana dijelaskan dalam literasi metodologi, penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memotret realitas sosial secara apa adanya tanpa manipulasi variabel. Fokus utamanya adalah mengungkap fakta, fenomena, dan variabel yang muncul saat penelitian berlangsung dengan narasi yang mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi terhadap sikap, pandangan, serta dinamika interaksi yang terjadi antara birokrasi dan masyarakat peternak. Penelitian ini dipandang sebagai sebuah proses dialektis yang berangkat dari ketertarikan peneliti dalam memahami fenomena sosial, yang kemudian dianalisis melalui lensa teori dan konsep peran pemerintah.

Tipe penelitian ini secara spesifik berupaya menjelaskan sasaran penelitian secara menyeluruh. Menurut Sahya Anggara (2015), penelitian deskriptif kualitatif tidak hanya memberikan gambaran permukaan, tetapi masuk ke dalam aspek-aspek substansial untuk menggali proses penyuluhan, implementasi program, serta bentuk dukungan institusional. Metode ini dipandang paling efektif untuk membedah pengalaman subjektif peternak dalam menerima transfer pengetahuan dan bagaimana perubahan perilaku tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Data yang digunakan bersumber dari **data primer** yang diperoleh melalui interaksi langsung, serta **data sekunder** yang berasal dari dokumen resmi, regulasi, dan laporan tahunan instansi.

Dalam penelitian kualitatif, narasumber tidak sekadar memberikan respon pasif, melainkan diposisikan sebagai **informan kunci (*key informants*)** atau pemilik informasi yang valid. Peneliti melibatkan 13 informan yang terdiri dari jajaran pimpinan DKPPP, tenaga medik veteriner, penelaah kebijakan, hingga praktisi peternak di lapangan. Komposisi ini dirancang agar terjadi triangulasi sumber yang kaya, mencakup perspektif dari pengambil kebijakan hingga penerima manfaat. Dalam desain operasionalnya, peneliti bertindak sebagai instrumen utama

(*human instrument*) yang bertanggung jawab menetapkan fokus, memilih informan, hingga melakukan penafsiran data berdasarkan teori peran pemerintah dari Sondang P. Siagian (2018). Indikator peran yang dianalisis mencakup fungsi pemerintah sebagai **stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana mandiri**.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat jalur integratif: observasi partisipatif untuk melihat realitas fisik, wawancara mendalam untuk menggali makna di balik tindakan, studi kepustakaan untuk memperkuat landasan teoretis, serta penelusuran data daring untuk memperkaya referensi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model **Miles dan Huberman**, yang mencakup proses reduksi data (merangkum dan memfokuskan hal penting), penyajian data (*data display*) dalam bentuk teks naratif atau matriks, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis ini bersifat interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga data mencapai titik jenuh (*saturation*).

Guna menjamin validitas dan reliabilitas temuan, peneliti melakukan uji kredibilitas data melalui beberapa strategi. Pertama, **perpanjangan pengamatan** dilakukan untuk membangun kepercayaan dengan informan sekaligus memastikan data yang terkumpul sudah benar. Kedua, **peningkatan ketekunan** dilakukan dengan membaca berbagai referensi buku dan dokumen terkait secara cermat. Ketiga, **triangulasi** sumber, teknik, dan waktu diterapkan untuk melakukan pengecekan silang terhadap kebenaran informasi. Terakhir, peneliti juga melakukan **analisis kasus negatif** dengan mencari data yang mungkin bertentangan dengan temuan awal untuk menguji ketangguhan kesimpulan. Dengan prosedur yang sistematis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kapasitas SDM peternak di Kabupaten Balangan melalui kerangka kerja Kesmavet yang profesional.

PEMBAHASAN

Menurut Sondang P. Siagian (2018), pemerintah memegang kendali sentral sebagai motor penggerak pembangunan nasional melalui lima fungsi strategis. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai stabilisator yang menjaga kondusivitas negara, tetapi juga sebagai inovator dan modernisator yang memperkenalkan pembaruan serta cara hidup yang lebih maju. Selain itu, pemerintah bertindak sebagai pelopor yang berani mengambil inisiatif di sektor-sektor krusial sekaligus menjadi pelaksana langsung dalam mengeksekusi berbagai program pembangunan demi menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1. Stabilisator

a. Efektivitas dalam penyeimbangan

Melalui rangkaian observasi, wawancara, dan studi dokumen, ditemukan bahwa performa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) dalam mengupayakan pengembangan SDM peternak melalui Program Kesmavet di Desa Sumber Rejeki tergolong kurang maksimal. Meski secara administratif DKP3 telah memiliki tata kelola sistem dan dokumentasi yang rapi serta mampu memberikan wawasan baru bagi sebagian peternak masih terdapat celah besar dalam aspek efektivitas program. Kendala utama terletak pada minimnya intensitas kegiatan, belum meratanya pendampingan di lapangan, serta partisipasi peternak yang tidak seragam.

Kondisi objektif di lapangan ini menunjukkan adanya diskrepansi dengan teori peran pemerintah yang dirumuskan oleh Sondang P. Siagian (2018). Dalam teori tersebut, pemerintah seharusnya bertindak sebagai penyeimbang yang menjamin distribusi program secara adil. Namun, kenyataannya fungsi "penyeimbangan" tersebut belum terealisasi di Desa Sumber Rejeki. Kegiatan pembinaan cenderung dilakukan secara sporadis dan tidak menjangkau seluruh lapisan peternak secara konsisten. Akibatnya, muncul kesenjangan pemahaman yang cukup tajam serta perbedaan kualitas hasil ternak antarindividu, sehingga tujuan utama untuk mengoptimalkan kapasitas SDM secara kolektif belum dapat tercapai sepenuhnya.

b. Kemampuan Selektif

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) dalam menjalankan fungsi stabilisator melalui program Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) di Desa Sumber Rejeki telah berjalan dengan sangat terarah. Efektivitas ini terlihat dari kemampuan instansi dalam menerapkan kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan riil para peternak. Dengan memprioritaskan kondisi kesehatan ternak di tiap wilayah, intervensi yang dilakukan baik berupa penyuluhan maupun tindakan operasional menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Meski demikian, para peternak berharap adanya pendampingan yang lebih kontinu agar manfaat program tidak berhenti di tengah jalan, melainkan menjadi solusi jangka panjang yang merata.

Langkah strategis yang diambil DKP3 ini sejalan dengan teori peran pemerintah yang dirumuskan oleh Sondang P. Siagian (2018). Siagian menegaskan bahwa pemerintah wajib menjaga stabilitas melalui kebijakan yang responsif dan penentuan prioritas yang tajam untuk menjamin pelayanan publik yang efektif. Dalam praktiknya, DKP3 telah mengimplementasikan teori tersebut dengan melakukan pemetaan wilayah rawan serta menyusun materi edukasi yang relevan berdasarkan fakta lapangan. Pengambilan keputusan yang selektif ini membuktikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya sekadar menjalankan rutinitas, tetapi telah bertindak sebagai manajer strategis yang mampu mengalokasikan sumber daya secara cerdas demi penguatan kualitas SDM peternak di Kabupaten Balangan.

2. Inovator

a. Menciptakan hal-hal yang baru

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terkait peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) di Desa Sumber Rejeki, Kabupaten Balangan, ditemukan bahwa fungsi inovasi dalam meningkatkan SDM peternak melalui program Kesmavet masih tergolong kurang optimal. Meski secara administratif DKP3 mengaku telah merancang terobosan seperti digitalisasi laporan dan sistem monitoring sanitasi, fakta di lapangan menunjukkan realita yang berbeda. Inovasi tersebut belum menyentuh seluruh lapisan peternak secara merata; metode pelatihan masih bersifat konvensional dan minim pemanfaatan teknologi modern.

Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara teori dan praktik. Jika merujuk pada teori Sondang P. Siagian (2018), pemerintah sebagai inovator seharusnya tidak hanya berhenti pada tahap gagasan atau perencanaan. Siagian menegaskan bahwa inovasi sejati harus terimplementasi secara konsisten, nyata, dan memberikan dampak luas bagi masyarakat. Dalam kasus ini, peran DKP3 belum sejalan dengan teori tersebut karena adanya diskoneksi antara laporan administratif dengan eksekusi di lapangan. Pemanfaatan media interaktif dan alat deteksi dini yang direncanakan justru jarang ditemui saat praktik berlangsung. Agar fungsi inovator ini berjalan efektif, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pembaruan benar-benar bisa diakses, dirasakan manfaatnya, dan mampu mengubah pola kerja peternak menjadi lebih modern dan produktif.

b. Tingkat keabsahan

Berdasarkan rangkaian observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen yang dilakukan, penulis menemukan bahwa peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Balangan dalam meningkatkan kapasitas peternak melalui program Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) telah memiliki legitimasi yang sangat kuat. Aspek keabsahan ini dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan yang senantiasa patuh pada standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku. Transparansi yang ditunjukkan melalui dokumentasi sistematis serta proses verifikasi berlapis telah berhasil membangun kepercayaan penuh dari para peternak di Desa Sumber Rejeki.

Temuan di lapangan mengonfirmasi bahwa kunci keberhasilan program ini terletak pada kedisiplinan administratif dan keterbukaan dalam pengawasan. Ketika setiap tindakan teknis dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan prosedur, masyarakat merasa lebih aman dan antusias untuk terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas lembaga merupakan fondasi utama dalam menggerakkan perubahan perilaku di tingkat akar rumput.

Secara teoritis, efektivitas pelaksanaan program Kesmavet oleh DKP3 Balangan ini sejalan dengan pemikiran Sondang P. Siagian (2018). Dalam teorinya mengenai peran pemerintah, Siagian menekankan pentingnya fungsi regulatif, pelayanan publik, serta penjaminan ketertiban administratif. Konsistensi DKP3 dalam menjaga validitas program ini membuktikan bahwa pemerintah bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan penjamin kualitas pembangunan yang mampu menyelaraskan aturan birokrasi dengan kebutuhan nyata para peternak di daerah.

3. Modernisator

a. Membuat Kemajuan yang Modern

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai indikator kemajuan modern, peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) dalam meningkatkan kualitas SDM peternak di Desa Sumber Rejeki dinilai masih kurang optimal. Meski secara administratif terdapat kemajuan signifikan melalui digitalisasi data, penggunaan teknologi inseminasi buatan, rapid test, serta aplikasi sistem informasi, namun fakta di lapangan menunjukkan realitas yang berbeda. Modernisasi layanan kesehatan hewan ini belum dirasakan secara merata karena minimnya sarana prasarana, keterbatasan alat laboratorium, serta langkanya tenaga medis di tingkat desa yang menghambat pemeriksaan rutin.

Kesenjangan ini menyebabkan hasil penelitian tidak sepenuhnya sejalan dengan teori Sondang P. Siagian (2018). Siagian menekankan bahwa pemerintah sebagai modernisator wajib memastikan transformasi berjalan nyata dan menyeluruh. Modernisasi bukan sekadar adopsi teknologi di atas kertas, melainkan harus mencakup ketersediaan fasilitas dan keberlanjutan dukungan agar masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.

Walaupun DKP3 telah memulai langkah inovatif sesuai teori Siagian, implementasinya masih bersifat parsial. Keterbatasan fasilitas di lapangan membuat kemajuan tersebut tidak tersampaikan ke seluruh lapisan peternak. Secara teoretis, pemerintah seharusnya menjamin bahwa modernisasi tidak hanya menjadi pencapaian kebijakan, tetapi hadir melalui pemerataan infrastruktur dan tenaga profesional yang konsisten demi kesejahteraan peternak yang berkelanjutan.

b. Kemampuan

Berdasarkan temuan di lapangan melalui observasi dan wawancara, efektivitas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Balangan sebagai Modernisator di Desa Sumber Rejeki masih perlu dievaluasi. Meskipun penyampaian materi program Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dinilai mudah dipahami, kualitas peningkatan SDM peternak belum optimal. Kendala utamanya terletak pada minimnya praktik lapangan. Padahal, bagi para peternak, demonstrasi langsung jauh lebih efektif dibandingkan sekadar teori agar ilmu yang didapat bisa segera diterapkan dalam keseharian.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dengan teori Sondang P. Siagian, yang menekankan bahwa peran modernisator harus mencakup pendekatan sistematis, inovatif, dan aplikatif. Menurut Siagian, pemerintah idealnya tidak hanya menyusun program di atas kertas, tetapi juga menyediakan pembelajaran utuh yang menggabungkan teori dengan praktik nyata serta fasilitas pendukung yang merata.

Meskipun DKP3 sudah memiliki struktur program yang jelas, absennya metode aplikatif dan pendampingan yang berkelanjutan membuat implementasinya belum memenuhi standar ideal. Untuk mencapai dampak yang lebih inklusif, pemerintah perlu memperkuat aspek pembinaan di lapangan dan memastikan akses program menjangkau seluruh peternak secara konsisten. Perubahan nyata hanya akan terjadi jika edukasi yang diberikan mampu menciptakan transformasi keterampilan yang terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

4. Pelopor

a. Panutan bagi Masyarakat

Temuan lapangan melalui observasi dan wawancara di Desa Sumber Rejeki menunjukkan bahwa peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Balangan dalam program Kesmavet belum berjalan optimal. Sebagai indikator pelopor, upaya dinas terhambat oleh minimnya frekuensi sosialisasi, rendahnya partisipasi peternak, serta kurangnya demonstrasi praktik di lapangan. Akibatnya, edukasi yang diberikan belum mampu menyentuh seluruh lapisan peternak secara menyeluruh.

Secara teoretis, kondisi ini bertolak belakang dengan pandangan Sondang P. Siagian (2018). Siagian menegaskan bahwa pemerintah wajib berfungsi sebagai innovator dan role model yang memberikan teladan nyata. Seorang pelopor seharusnya menunjukkan konsistensi, komunikasi yang efektif, serta penerapan best practice yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Meskipun DKP3 telah menunjukkan aspek positif dalam disiplin administrasi dan sikap santun, terdapat kesenjangan besar antara teori dan realita. Minimnya publikasi dan tidak meratanya sebaran informasi membuat fungsi keteladanan tersebut tidak dirasakan manfaatnya secara luas. Dalam kacamata Siagian, kegagalan menjangkau seluruh peternak menandakan bahwa fungsi pemerintah sebagai figur panutan belum maksimal. Singkatnya, tanpa adanya intensitas dan pemerataan aksi, langkah DKP3 belum sepenuhnya memenuhi standar teoretis sebagai pelopor pembangunan SDM peternak yang ideal.

b. Kinerja

Melalui pendekatan observasi lapangan dan dialog langsung dengan para pemangku kepentingan, terlihat bahwa kontribusi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan di Desa Sumber Rejeki telah berjalan secara optimal. Keberhasilan ini tercermin dari kemampuan instansi dalam memadukan aspek teknis operasional dengan tata kelola administrasi yang relevan bagi kebutuhan peternak. Dampak nyatanya sangat terasa: para peternak kini lebih sigap dalam menangani penyakit hewan dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam berkat solusi praktis yang ditawarkan di lapangan.

Namun, efektivitas ini tidak boleh berhenti di sini. Agar manfaatnya tidak timpang dan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan peternak, diperlukan konsistensi serta keberlanjutan program dalam jangka panjang. Temuan ini memberikan pesan penting bahwa indikator keberhasilan sebuah lembaga tidak hanya terpaku pada

selesainya agenda formal, melainkan pada kualitas interaksi manusia dan tindak lanjut konkret yang dirasakan masyarakat.

Secara teoritis, capaian ini memvalidasi pemikiran **Sondang P. Siagian (2018)** mengenai peran krusial pemerintah. Dinas terkait terbukti tidak sekadar menjalankan fungsi birokrasi, tetapi telah bertransformasi menjadi agen pembinaan dan pemberdayaan. Sejalan dengan pandangan Siagian, kinerja pemerintah yang benar-benar efektif adalah yang mampu menghadirkan perubahan nyata, akuntabel, serta berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusianya.

5. Pelaksana Langsung

a. Berperan sebagai pelaksana

Hasil riset lapangan di Desa Sumber Rejeki menunjukkan dualitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Balangan dalam program Kesmavet. Melalui wawancara, terlihat bahwa DKP3 sangat responsif dalam memberikan pendampingan teknis. Petugas proaktif turun ke lapangan untuk melakukan vaksinasi, pengecekan kandang, hingga pengelolaan logistik secara menyeluruh guna membantu peternak.

Namun, observasi mendalam mengungkap sisi yang berbeda. Pelaksanaan program ini masih terbelenggu oleh ketergantungan yang tinggi pada anggaran dan arahan pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini menyebabkan DKP3 kurang mandiri dan fleksibel dalam menanggapi kebutuhan lokal yang spesifik, sehingga inovasi di tingkat daerah cenderung terhambat.

Temuan ini menunjukkan adanya ketidakselarasan dengan teori peran pemerintah dari Sondang P. Siagian (2018). Menurut Siagian, pemerintah sebagai pelaksana seharusnya beroperasi secara mandiri, berkesinambungan, dan adaptif. Realitasnya, DKP3 belum memenuhi kriteria tersebut karena keterbatasan otonomi operasional. Selain itu, metode edukasi yang masih dominan pada teori tanpa praktik langsung membuat transfer keterampilan kepada peternak menjadi tidak optimal. Singkatnya, meski secara teknis sudah berjalan, fungsi DKP3 sebagai pelaksana belum mencapai standar ideal kemandirian pelayanan publik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap pembahasan pada penelitian mengenai peran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Balangan, dapat ditarik sebuah simpulan komprehensif. Secara umum, pelaksanaan Program Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) di Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai, dinilai masih belum mencapai titik optimal dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para peternak. Penilaian terhadap kinerja instansi ini didasarkan pada lima variabel utama yang memotret berbagai dimensi pelayanan publik. Pada dimensi pertama, yaitu variabel stabilisator, ditemukan bahwa efektivitas penyeimbangan program masih tergolong kurang baik. Kondisi ini dipicu oleh pola pembinaan di lapangan yang bersifat sporadis dan tidak merata. Akibatnya, muncul kesenjangan pemahaman yang cukup lebar di antara para peternak mengenai prinsip-prinsip kesehatan ternak. Meskipun demikian, dinas menunjukkan performa yang cukup kuat pada aspek kemampuan selektif, di mana pengambilan keputusan strategis dalam program dianggap telah memberikan dampak positif yang terukur terhadap keberlangsungan program

Kesmavet.

Selanjutnya, jika ditinjau dari variabel inovator, peran DKP3 terlihat masih menghadapi kendala besar dalam menciptakan terobosan atau hal-hal baru. Inovasi program serta penggunaan metode pelatihan berbasis teknologi modern masih sangat terbatas, sehingga kegiatan terkesan monoton dan kurang adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun, dari sisi tingkat keabsahan, program ini memiliki nilai yang sangat baik. Konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan selalu berpegang teguh pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan regulasi resmi yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan sistem dokumentasi yang lengkap serta proses verifikasi berlapis, sehingga akuntabilitas program secara administratif tetap terjaga dengan sangat profesional. Di sisi lain, variabel modernisator menunjukkan potret yang kurang menggembirakan. Upaya membawa kemajuan modern terkendala oleh keterbatasan infrastruktur fisik, seperti alat uji kesehatan, perlengkapan laboratorium, serta jumlah tenaga medis yang sangat minim. Selain itu, kelemahan pada variabel kemampuan juga terlihat dari metode edukasi yang cenderung teoritis dan minim praktik lapangan langsung. Hal ini berisiko membuat peternak hanya memiliki pemahaman kognitif tanpa disertai keterampilan teknis yang mumpuni dalam menangani ternak mereka.

Evaluasi terhadap variabel pelopor juga menunjukkan adanya tantangan pada indikator panutan bagi masyarakat. Minimnya jumlah peternak yang terlibat dalam kegiatan serta kurangnya publikasi dan demonstrasi lapangan secara masif mengakibatkan program ini belum menjadi magnet bagi perubahan perilaku peternak secara luas. Walaupun begitu, secara manajerial, kinerja dinas dinilai cukup baik karena mampu menyelaraskan aspek teknis dan administrasi dengan kebutuhan riil peternak, yang perlahan mulai membuah hasil berupa penanganan penyakit yang lebih responsif di tingkat lokal. Terakhir, pada variabel pelaksana sendiri, kemandirian dinas terlihat masih lemah. Implementasi Kesmavet di tingkat daerah masih sangat bergantung pada kucuran anggaran, instruksi kebijakan, serta arahan dari pemerintah pusat maupun provinsi, sehingga ruang gerak untuk melakukan improvisasi lokal menjadi terbatas.

Keberhasilan atau kegagalan peran DKP3 ini sejatinya dipengaruhi oleh dialektika dua faktor utama. Faktor pendukung meliputi ketersediaan SDM internal, landasan regulasi yang kuat, sistem administrasi yang tertata, serta hubungan sosial yang harmonis antara petugas dan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat yang paling dominan adalah rendahnya partisipasi aktif dari peternak, keterbatasan fasilitas medis, serta tantangan dalam mengadaptasi kebijakan baru di tengah kebiasaan lama masyarakat yang sudah mengakar dan sulit diubah. Kondisi geografis yang menantang juga menjadi hambatan logistik dalam pemerataan layanan kesehatan hewan.

Sebagai langkah perbaikan, sangat disarankan bagi Kepala Bidang Peternakan untuk merumuskan strategi yang lebih agresif dalam meningkatkan efektivitas Kesmavet. Hal ini dapat dimulai dengan memperkuat partisipasi peternak melalui penyuluhan langsung di area kandang (*on-site coaching*) menggunakan materi edukasi yang lebih visual dan praktis. Pengadaan alat pemeriksaan dasar dan vaksinasi merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda agar pelayanan medis tidak sekadar formalitas. Selain itu, penambahan personel petugas lapangan sangat diperlukan guna mengatasi hambatan geografis agar setiap peternak di pelosok wilayah mendapatkan hak pendampingan yang sama. Di tingkat teknis, petugas lapangan dan dokter hewan diharapkan meningkatkan intensitas monitoring penyakit musiman melalui koordinasi rutin untuk meminimalkan risiko wabah. Untuk mengubah pola pikir peternak yang konservatif, pendekatan sosiologis melalui pelibatan "peternak pelopor" sebagai model percontohan dapat

menjadi solusi yang lebih persuasif dibandingkan hanya mengandalkan instruksi birokratis. Dengan sinergi ini, diharapkan kualitas SDM peternak di Kabupaten Balangan dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Pustaka Setia.

Siagian, S. P. (2018). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Bumi Aksara.

Soekanto, S. (2014). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

Soetriono, & Ani, S. W. (2020). *Perencanaan Pembangunan Pertanian*. Andi Offset.